

Kontribusi Penting Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Perikanan di Rawa Lebak Pampangan

Important Contribution of Stakeholder for Fisheries Management of Pampangan Swamp

Dina Muthmainnah^{1*)}, Ni Komang Suryati¹, Khusnul Khotimah²

¹Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sumatera Selatan 30111

²Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan 30116

^{*)}Penulis untuk korespondensi: dina.muthmainnah@kkp.go.id

Sitasi: Muthmainnah D, Suryati NK, Khotimah K. 2019. Important contribution of stakeholder for fisheries management of pampangan swamp. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2019, Palembang 4-5 September 2019.* pp. 221-227. Palembang: Unsri Press.

ABSTRACT

Stakeholders are the individuals, groups, or institutions with interest in natural resources at a location, or the person who has the potential to influence activities and provide benefits or losses in the changing conditions. The study aimed to determine the role of stakeholders in the fisheries sector through an ecosystem approach as a component of fisheries management in the Pampangan swamp of Ogan Komering Ilir Regency. This research was conducted in 2016 by collecting the primary data in the field and secondary data from relevant agencies. The research location was Pampangan swamp of Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. There were about ten samples in 10 villages using an opened questionnaire. Data were analyzed by tabulating the stakeholders' interests and roles. The results showed that the stakeholders were the fishers, fish collector, traders, the government officer, and fish cultivators. Local government plays an important role in determining the management policy for inland fisheries.

Keywords: fisheries, management, Pampangan swamp, stakeholder

ABSTRAK

Pemangku kepentingan adalah perorangan, kelompok, atau lembaga yang berkepentingan dengan sumber daya alam di suatu lokasi atau orang yang berpotensi mempengaruhi aktivitas di lokasi tersebut dan memberikan keuntungan atau kerugian jika terjadi perubahan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran pemangku kepentingan pada sektor perikanan menggunakan pendekatan ekosistem di rawa lebak Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai komponen dari pengelolaan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei tahun 2016 menggunakan data primer di lapangan dan data sekunder dari instansi terkait. Lokasi penelitian adalah rawa lebak di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah responden sedikitnya 10 orang perdesa pada 10 desa sample sepanjang perairan rawa lebak menggunakan kuesioner terbuka. Data dianalisis menggunakan tabulasi pemangku kepentingan, kepentingan dan peranannya. Hasil penelitian menunjukkan pemangku kepentingan sektor perikanan di rawa lebak Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yaitu nelayan tangkap, pedagang pengumpul, pemerintah dan pembudidaya ikan. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan perikanan perairan umum.

Kata kunci: pengelolaan perikanan, pemangku kepentingan, rawa lebak Pampangan

PENDAHULUAN

Rawa lebak sebagai salah satu bagian dari lahan basah air tawar merupakan suatu ekosistem yang penting dan unik dalam bentang alam secara umum. Ekosistem ini memberikan lingkungan yang cocok untuk fungsi-fungsi biogeokimia, fisika dan diperlukan untuk mempertahankan kesehatan lingkungan dalam satu kawasan aliran air. Rawa lebak juga berfungsi sebagai habitat ikan dan satwa liar, produsen primer, penguraian limbah dan daur nutrisi termasuk karbon (Bailey, 2006). Selain itu juga berfungsi sebagai tandon air baik untuk jangka panjang maupun pendek, mempertahankan tingginya air tanah, menjadi tempat masuk dan keluarnya air tanah, transportasi dan siklus elemen-elemen, menahan dan membuang elemen-elemen yang terlarut dan akumulasi sedimen anorganik (National Research Council, 1995).

Sebagai suatu tipe perairan umum yang menyimpan potensi sumber daya perikanan, rawa lebak telah dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan tangkap. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya secara berkelanjutan diperlukan tindakan pengelolaan yang tepat sehingga tidak ada pengguna yang dirugikan. Dalam menentukan suatu pola pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum, sangat penting dilakukan studi tentang peran para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah perorangan, kelompok, atau lembaga yang berkepentingan dengan sumber daya alam di suatu lokasi atau orang atau kelompok yang berpotensi mempengaruhi aktivitas di lokasi tersebut dan memberikan keuntungan atau kerugian jika terjadi kondisi yang berubah (Golder & Gauler, 2005).

Partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang diinginkan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Pengelolaan dengan pendekatan ini berdasarkan pada aturan, tatacara, kebijakan, kearifan yang dibuat atas kesepakatan masyarakat pemangku kepentingan.

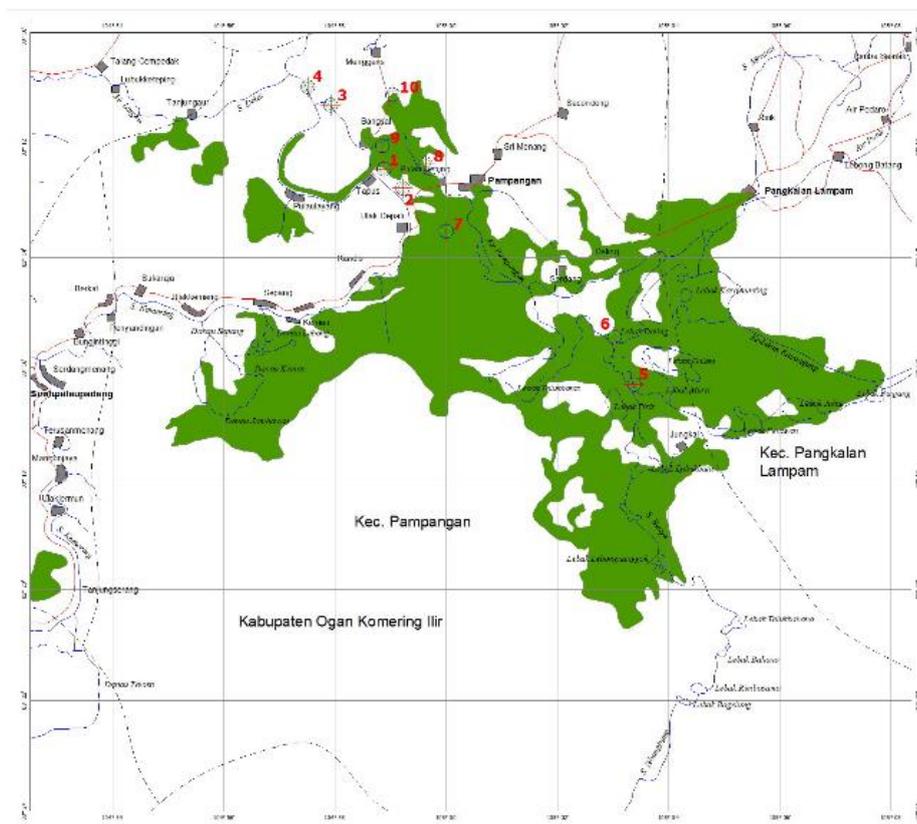
Partisipasi masyarakat adalah hal yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum rawa lebak. Agar seluruh pemangku kepentingan mendapatkan manfaat tanpa merugikan pemangku kepentingan lain diperlukan sistem pengelolaan yang partisipatif yaitu sistem pengelolaan yang melibatkanseluruh masyarakat/pemangku kepentingan dengan tujuan mencapai peningkatan kesejahteraan/penghasilan, pemerataan dan keberlanjutan manfaat rawa lebak (Muthmainnah, 2011). Pemerintah harus menggiatkan keikutsertaan aktif para nelayan atau pembudidaya ikan dan anggota masyarakat lainnya dalam praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab sesuai dengan asas kewajiban penyertaan semua pemangku kepentingan (Hartoto *et al.*, 2007).

Dalam menyusun pola pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan tahapan kerja yang mencakup penelitian, perencanaan dan perancangan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi (Muthmainnah *et al.*, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran pemangku kepentingan pada sektor perikanan menggunakan pendekatan ekosistem di rawa lebak Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai komponen dari pengelolaan perikanan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada 2016 berupa pengambilan data primer di lapangan dan data sekunder dari instansi terkait dan bersifat survei lapang. Lokasi penelitian adalah pada

rawa lebak di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1).



Gambar 1. lokasi penelitian

Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah responden yang diwawancarai menggunakan kuesioner terbuka pada tiap desa sedikitnya 10 orang pada 10 desa di sepanjang perairan rawa lebak. Data dianalisis dengan cara: 1) mengidentifikasi pemangku kepentingan cara wawancara atau tukar pikiran, selanjutnya dilakukan penelitian kondisi sosial untuk menentukan pemangku kepentingan yang potensial, 2) membuat daftar sifat sumber daya dan menentukan peran masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumber daya: sebagai sumber mata pencaharian, memberi keuntungan, kepemilikan, izin pemanfaatan, dan administrasi atau penanggung jawab (Golder & Gauler, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku kepentingan dalam pemanfaatan rawa lebak untuk perikanan yang dikategorikan lagi penggunaannya berdasarkan keterkaitan langsung atau tidak langsung terhadap rawa lebak. Pemangku kepentingan di sini dikelompokkan berdasarkan hasil kuesioner identifikasi potensi pemangku kepentingan (Tabel 1).

Rawa lebak Pampangan yang telah memberikan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar, hendaknya dikelola dengan memperhatikan keseimbangan ekstraksi sumber daya dengan konservasi ekosistem rawa lebak. Pengelolaan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi oleh suatu lembaga dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan dalam proses pembuatan keputusan secara partisipatif sehingga masing-masing pemangku kepentingan mempunyai andil tanggung jawab. Untuk itu kepedulian

masyarakat terhadap keberlanjutan pemanfaatan dan integritas ekosistem rawa lebak merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tindakan pengelolaan.

Tabel 1. Kepentingan dan peranan pemangku kepentingan sektor perikanan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Peranan
Nelayan	- Sebagai mata pencaharian	- Mengeksploitasi sumber daya perikanan
Pedagang ikan	- Jembatan antara produsen dan konsumen	- Mengambil keuntungan dengan menentukan harga beli dan jual
Pegawai Pemerintah Daerah	- Mengatur untuk meningkatkan produksi perikanan dari kegiatan budidaya dan penangkapan - Meningkatkan PAD dari kegiatan pemanfaatan lahan rawa	- Sebagai administrator dan regulator dalam kebijakan pembangunan kawasan rawa lebak
Pembudidaya ikan	- Meningkatkan penghasilan usaha tambahan	- Memanfaatkan badan air untuk budidaya ikan selain kegiatan sebagai nelayan atau petani sawah

Pemangku kepentingan adalah manusia yang mengambil manfaat dari ekosistem rawa lebak, terdiri dari petani dan nelayan, serta penduduk yang tinggal di sekitar rawa yang secara tidak langsung mendapat manfaat dari kegiatan di ekosistem rawa lebak. Pemanfaatan sumber daya alam rawa lebak hendaknya memperhatikan aspek keadilan antar masyarakat pengguna. Di sini dapat diketahui bahwa pemangku kepentingan merupakan bagian dari komponen pengelolaan rawa lebak.

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa rawa lebak Pampangan dimanfaatkan oleh sektor perikanan untuk aktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Manusia lebih dulu mengenal perikanan tangkap, kemudian memahami kemungkinan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan cara manusia sebagai pelaku utama dengan hanya menggunakan alat tangkap sederhana; dan menangkap dengan mengamati terlebih dahulu pola atau perilaku ikan kemudian disesuaikan dengan alat tangkap yang akan digunakan. Kegiatan budidaya ikan dimulai dengan mengumpulkan benih-benih di kanal atau rawa-rawa. Benih-benih itu ditebar dan dipelihara di dalam wadah penampungan, kemudian dilakukan seleksi ukuran untuk dipisahkan dan dilanjutkan dengan pembesaran hingga ukuran yang dapat dikonsumsi (<http://nptel.ac.in/courses/120108002/8>).

Pemangku kepentingan merupakan orang, komunitas, kelompok sosial ekonomi dan atau yang terkena dampak kebijakan, program dan aktivitas pembangunan dan memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan (Gonsalves *et al.*, 2005). Pemangku kepentingan yang terkait adalah nelayan sebagai pemangku kepentingan utama yang menjadikan ekstraksi sumber daya perikanan di rawa lebak sebagai mata pencaharian, di samping itu pedagang pengumpul dan pemasar merupakan pemangku kepentingan sekunder yang mendapatkan keuntungan dari hasil nelayan di rawa lebak. Praktek pengelolaan yang berlaku sekarang di kawasan rawa lebak dibagi atas beberapa “unit lelang” yang masing-masing unit dikelola oleh kelompok nelayan, kegiatan penangkapan berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya pada musim kemarau saat ikan terkonsentrasi di lebung. Sistem Lelang Lebak Lebung memberi hak eksploitasi sumber daya ikan di suatu badan air oleh “pengemin”. Bila pengemin adalah bagian dari kelompok nelayan maka keuntungan dari hasil penangkapan ikan dibagi antar anggota sendiri dengan cara relatif adil. Bila pengemin bukan nelayan, misalnya sebagai pedagang pengumpul

maka nelayan berhadapan dengan sitem ijon bahkan nelayan lebih bersifat sebagai buruh (Muthmainnah & Prisantoso, 2016).

Peranan pemangku kepentingan merupakan cara dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan merupakan salah satu unsur efektif dalam memotivasi personal atau kelompok untuk berpartisipasi. Gruber (2010) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya pengelolaan alam berbasis komunitas dipandang sebagai suatu mekanisme untuk mengatasi tujuan ekonomi dan sosial dan untuk menyeimbangkan tindakan eksploitasi dan konservasi dari suatu ekosistem. Pengelolaan perikanan memiliki tujuan utama yaitu memberikan manfaat social ekonomi yang optimal bagi komunitas/masyarakat namun tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri (NWG EAFM, 2014.).

Lebih lanjut Trust (2003) menyatakan bahwa mengelola suatu sumber daya umumnya bermakna mengoptimalkan pemanfaatan dan mengelola suatu aset dimaksudkan mendapatkan keuntungan tinggi tanpa resiko yang terlalu besar. Karena mengelola muncul dari penciptaan kesejahteraan manusia maka dasarnya harus efisiensi. Dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan juga harus melibatkan tidak hanya efisiensi dalam artian tekno-ekonomi, tapi juga harus berdasarkan pada pemerataan (*equity*) dalam memanfaatkan sumber daya. Pemerataan juga berarti kesempatan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan demikian pengelolaan meliputi efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan. Efisiensi bisa dikaitkan atau berhubungan dengan mata pencaharian, konservasi dan produksi, sedangkan keberlanjutan (*sustainable*) berkaitan dengan partisipasi generasi sekarang dalam pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Pengelolaan rawa lebak merupakan kebijakan terintegrasi untuk mencapai pemanfaatan berkelanjutan baik nilai ekologi maupun sosio-ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan hendaknya tidak melebihi kapasitas regeneratif dan asimilatif. Sesuai dengan Lackey (1998) bahwa pengelolaan ekosistem harus mempertahankan ekosistem dalam kondisi baik untuk mencapai keuntungan sosial yang diinginkan dan pengelolaan harus mengambil keuntungan dari kemampuan ekosistem untuk merespon terhadap berbagai tekanan baik yang alami maupun buatan manusia.

Kebijakan pengelolaan konkrit yang dapat dilakukan oleh pemanfaat sekunder dari lembaga pemerintah adalah i) Pemberian dana pinjaman Pemerintah untuk perikanan, ii) Alokasi dana untuk perikanan oleh bank pembangunan nasional, iii) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk perikanan (bank perikanan), iv) Koperasi perikanan, v) Jaminan pinjaman pemerintah. vi) Subsidi bunga. vii) Bantuan pemerintah untuk asuransi kapal penangkap ikan (Tietze & Villareal, 2003).

KESIMPULAN

Pemangku kepentingan dalam pemanfaatan di sektor perikanan rawa lebak Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan adalah nelayan tangkap, pedagang pengumpul, pegawai pemerintah dan pembudidaya ikan. Pemerintah daerah/pemerintah desa memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan perikanan perairan umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam melakukan wawancara dari mahasiswa pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2016-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey DE. 2006. Wetland Vegetation Dynamics and Ecosystem Gas Exchange in Response to Organic Matter Loading Rates. [Thesis]. Virginia: The Faculty of the School of Marine Science College of William and Mary.
- Golder B, Gawler M. 2005. Cross-Cutting Tool Stakeholder Analysis. October 2005. Edited by: Foundations of Success Resources for Implementing the WWF Standards.
- Gonsalves J, Becker T, Braun A, Campilon D, de Chaves D, Fajber M, Capiriri E, Caminade JR., Vernoooy R. 2005. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management: A resource book (glossary). Philippines: International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development.
- Gruber JS. 2010. Key Principles of Community-Based Natural Resource Management: A Synthesis and Interpretation of Identified Effective Approaches for Managing the Common. *Environment Management*. (45).
- Hartoto DI, Samuel, Krismono. 2007. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Indonesia Sesuai Semangat Undang-undang No. 31 Tahun 2004. Prosiding Forum Perairan Umum Indonesia III. Buku I: Makalah Utama. Jakarta: Pusat Riset Perikanan Tangkap. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Lackey RT. 1998. Seven Pillars of Ecosystem Management. *Landscape and Urban Planning*. (40) :21-30.
- Muthmainnah D. 2011. Pengelolaan Partisipatif Perikanan Perairan Umum Rawa Lebak. *Dalam* Prosiding Forum Perairan Umum Indonesia Ke-8. BPPPU. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Palembang: Badan Litbang KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Muthmainnah D, Gaffar AK, Wiadnyana NN. 2011. Langkah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Provinsi Riau. *Dalam* Perikanan dan Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Riau. Editor: N.N. Wiadnyana, A.K. Gaffar & Husnah. BPPPU. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Badan Litbang KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Palembang: Bee Publishing. Palembang: p. 321-336.
- Muthmainnah D, Prisantoso BI. 2016. Integrated swamp management to promote sustainability of fish resources (Case Study in Pampangan Swamp, South Sumatra Province, Indonesia). *Freshwater, Fish and the Future: Proceeding of the Global Cross-Sectoral Conference. Food and Agriculture Organization of the United Nation-Michigan State University*. USA: American Fisheries Society. USA: p.319-324.
- National Research Council. 1995. Research-Doctorate Programs in the United States Continuity and Change. Washington, D.C: National Academy of Sciences.
- NWG EAFM. 2014. Modul Penilaian Indikator untuk Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem. National Working Group on Ecosystem Approach to Fisheries Management. Direktorat Sumber Daya Ikan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- Tietze U, Villareal LV. 2003. Microfinance in fisheries and aquaculture: guidelines and case studies. FAO Fisheries Technical Paper No. 440. Rome, FAO. 114 pp.
- Trust DT. 2003. Management of Natural Resources. Supporting Natural Resources and Environment Management Intitiaves. Bombay: Sir Dorabji Tata Trust.
- <http://nptel.ac.in/courses/120108002/8>: Capture of Fisheries.